



**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**
Jl. dr. Soetomo no.1 Slawi, telp. (0283) 491116, fax. (0283) 491289
Website : bkd.tegalkab.go.id; email: bkd@tegalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan Ridha-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Kami menyadari bahwa lingkungan strategis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal akan selalu berkembang secara dinamis. Oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pemangku kepentingan sangat kami harapkan, sehingga Renja ini dapat secara efektif menjadi medium bagi peningkatan kinerja pembangunan kepegawaian dan pewujudan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tegal.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap usaha kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Slawi, Agustus 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**



RETNO SUPROBOWATI, SH. MM. M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19601101 198603 2 008



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu disusun rencana kerja tahunan Perangkat Daerah;

b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 telah dilakukan verifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 30);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tahun 2024;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan.

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD dr. Soeselo;
 - d. RSUD Suradadi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- t. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- u. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- v. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- w. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- x. Sekretariat Daerah;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- z. Kecamatan Adiwerna;
- aa. Kecamatan Balapulang;
- bb. Kecamatan Bojong;
- cc. Kecamatan Bumijawa;
- dd. Kecamatan Dukuhturi;
- ee. Kecamatan Dukuhwaru;
- ff. Kecamatan Jatinegara;
- gg. Kecamatan Kedungbanteng;
- hh. Kecamatan Kramat;
- ii. Kecamatan Lebaksiu;
- jj. Kecamatan Margasari;
- kk. Kecamatan Pagerbarang;
- ll. Kecamatan Pangkah;
- mm. Kecamatan Slawi;
- nn. Kecamatan Suradadi;
- oo. Kecamatan Tarub;
- pp. Kecamatan Talang;
- qq. Kecamatan Warureja;
- rr. Inspektorat;
- ss. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- tt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- uu. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- vv. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

(2) Isi dan uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH



Diundangkan di Slawi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 50

DAFTAR ISI

Contents

	Halaman
Surat Penetapan Perubahan Rencana Kerja BKD Kab. Tegal	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSAAAN RENCANA KERJA BKD KABUPATEN TEGAL TRIWULAN II TAHUN 2020	6
2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.2. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKD KABUPATEN TEGAL	40
3.1. Telaahan, terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	53
4.1. Rencana Kerja	53
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	60
BAB V PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Renja BKD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan BKD Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Tegal yang disusun berpedoman kepada Renstra BKD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021. Renja BKD Kabupaten Tegal merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia". Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Penyusunan Renja antara lain: (1) program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi BKD sebagai pengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. (2) adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. (3) program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. dan (4) adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2021 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
16. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 050/23/306/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal tahun 2021 sebagai dokumen resmi perencanaan daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 periode tahun kedua 2021;
2. Sebagai arah bagi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2021;
3. Sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2021;
4. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2021;
5. Sebagai landasan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021;
6. Sebagai arah bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di BKD Kabupaten Tegal pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dalam asumsi satu periode Renstra. Evaluasi tahun 2019 berada dalam periode Renstra 2014-2019, sedangkan Renja 2021 berada dalam periode Renstra 2019-2024 dan baru efektif berjalan sampai dengan triwulan I tahun 2020, sehingga evaluasi dilaksanakan sampai dengan triwulan I Tahun 2020.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja utama perangkat daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai rencana kerja perangkat daerah meliputi indicator kinerja dan target yang hendsk dicapai pada tahun 2021, serta sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKD KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja tahun lalu diasumsikan dalam periode rencana strategis yang sama karena rencana kerja merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis.

Sehubungan dengan evaluasi tahun 2019 berada dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019, sedangkan Renja 2021 berada dalam periode tahun kedua Renstra 2019-2024 dimana renstra 2019-2024 baru efektif berjalan sampai dengan triwulan kedua tahun 2020, maka evaluasi atas pelaksanaan renja tahun lalu dalam periode Renstra yang sama dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020.

Realisasi keuangan dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Realisasi Keuangan
Tahun Anggaran 2020 s.d triwulan II

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi s.d Triwulan I	Persentase Realisasi
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	2.637.500.000	216.700.250	8,22 %
1.	Pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan Penjurusan ASN	2.137.500.000	188.558.050	8,82 %
2.	Pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional ASN	500.000.000	28.142.200	5,63 %

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi s.d Triwulan I	Persentase Realisasi
II.	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	1.669.000.000	271.612.230	16,27 %
3	Penilaian Kompetensi ASN	667.000.000	15.401.136	2,31 %
4	Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	837.000.000	239.248.514	28,58 %
5	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	165.000.000	16.962.580	10,28 %
III.	Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN	5.695.000.000	1.619.305.012	28,43 %
6	Pengelolaan Data dan Sistem Layanan Kepegawalan	628.500.000	211.822.302	33,70 %
7	Pengadaan/Pemeliharaan Pengelolaan Data dan SIM Kepegawalan	155.000.000	0	0 %
8	Penataan Administrasi Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan ASN	4.765.000.000	1.372.740.810	28,81 %
9	Penataan Pemindehaan dan Pemberhentian ASN	146.500.000	34.741.900	23,71 %
IV.	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	489.000.000	177.709.450	36,34 %
10	Pembinaan ASN	184.000.000	39.742.400	21,60 %
11	Pemberiaan Penghargaan dan Kesejahteraan ASN	305.000.000	137.967.050	45,24 %
V.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawalan, dan Perencanaan Perangkat Daerah	1.609.000.000	644.376.487	40,05 %
12	Penyediaan Jasa Kantor	460.000.000	190.852.604	41,49 %
13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	329.500.000	163.451.160	49,61 %
14	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	455.000.000	232.440.000	51,09 %
15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	0	0 %
16	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	85.000.000	7.080.000	8,33 %
17	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	50.000.000	26.175.000	52,35 %
18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	184.500.000	24.377.723	13,21 %
		12.099.500.000	2.929.703.429	24,21 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua adalah sejumlah Rp 2.929.703.429,- dari pagu anggaran Rp 12.099.500.000,- atau dengan capaian 24,21 %. Terdapat 1 (satu) kegiatan sampai dengan triwulan kedua belum merealisasikan keuangannya namun secara fisik, kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan baik dengan persiapan administrasi kegiatannya maupun pelaksanaannya yaitu kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Pengelolaan Data dan SIM Kepegawaian. Sedangkan dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan rasionalisasi program dan kegiatan tahun 2020 yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang muncul dari pandemi ini. Oleh karena itu realisasi anggaran 2020 sampai dengan triwulan kedua mengalami kendala dalam pencapaiannya.

Adapun evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan pertama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
<i>Program Pendidikan dan Pelatihan ASN</i>										
		persentase PNS mengikuti Pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	28,09 Persen					5,62	0,95	0,003
		persentase Pejabat Fungsional Non pendidikan dan non pengawasan yang mengikuti Pelatihan fungsional, mendapatkan Sertifikat STTPL	25,99 Persen					4,34	4,34	0,00
		persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar/prajabatan sesuai dengan peraturan	100 persen					100	100	100,00
	Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan penjenjangan ASN									
		jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	89 PNS					9	3	3,37
		jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/ prajabatan	1.500 CPNS					300	31	2,07
	Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional ASN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis	500 ASN					100	0	0
		jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional	275 ASN					55	60	21,82
		jumlah peserta ujian dinas/ penyesuaian ijazah	500 PNS					100	100	20,00
		Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN								
		persentase jabatan struktural terisi sesuai kompetensi	96,00 persen					95,50	92,69	97,06
		persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	34,94 persen					0,92	0,92	2,63
		persentase PNS non fungsional yang diuji kompetensinya	61,15 persen					6,43	6,43	10,52
		Penilaian Kompetensi ASN								
		jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya	2.000 PNS					300	182	60,67
		jumlah PNS Pelaksana yang mengikuti SAP	1.200 PNS					300	0	0
		Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi								
		jumlah JPT dan Administrator yang dilantik	500 Orang					100	800	160,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		jumlah kepala sekolah yang dilantik	250 orang					50	50	20,00
		jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP	134 PNS					30	44	32,84
		jumlah formasi JPT yang terisi	24 formasi					6	8	33,33
	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional									
		jumlah pejabat fungsional yang dinilai kompetensinya	105 PNS					25	5	4,76
		jumlah PNS yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi	145 PNS					25	10	6,90
		jumlah pejabat fungsional yang mendapatkan SK JFT	1.000 PNS					200	250	25,00
		jumlah pejabat fungsional yang dilantik/ dikukuhkan	1.000 PNS					200	250	25,00
		jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan	150 PNS					30	41	136,67
	Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN	persentase layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	75,00 persen					16,67	16,67	22,23
	Pengelolaan Data dan Sistem Layanan Kepegawaian									
		jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara	9.700 File					9.700	9.700	100,00
		jumlah KIP yang dicetak	7.500 Buah					1.500	1.500	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		jumlah OPD/UPTD dengan presensi elektronik	910 Unit					910	910	100,00
		jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG	9.700 Orang					8.955	8.955	92,32
	Pengadaan/Pemeliharaan Pengelolaan Data dan SIM Kepegawaian									
		jumlah SIM dan perangkat yang dipelihara	917 SIM					0	0	0
		jumlah SIM yang dibangun/dikembangkan dan terintegrasi dengan SIMPEG	9 SIM					2	1	11,11
	Penataan Administrasi Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan ASN									
		jumlah SK Kenaikan Pangkat	8.500 SK					1.500	2.000	23,53
		jumlah CASN	2.550 orang					350	499	19,57
		jumlah SK CASN	2.550 SK					350	499	19,57
		Jumlah SPTKGB	3,5 SK					500	1.000	28,57
		Jumlah buku formasi	50 buku					10	10	20,00
		Jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	1.250 CPNS					250	307	24,56
	Penataan Pemindehan dan Pemberhentian ASN									
		jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/anak)	3.083 SK					563	581	18,85
		jumlah PNS mutasi kerja/alih fungsi	225 PNS					45	10	4,44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,46 persen					0.52	0.52	86,96
	Pembinaan Aparatur Sipil Negara									
		jumlah usulan karpeg, Karis/Karsu yang terealisasi	1.350 Kartu					150	150	11,11
		jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Per-UU	800 PNS					140	140	17,50
		jumlah ASN yang mendapatkan Hudis	37 ASN					50	50	64,87
		jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS	49 Unit					0	0	0
		jumlah ijin perceraian yang diterbitkan	40 ijin					40	40	100,00
		jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	80 PNS					104	104	130,00
	Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan ASN									
		jumlah JPT/Administrator yang diperiksa kesehatannya	50 PNS					20	0	0
		jumlah ASN yang mendapatkan SLKS	1.175 ASN					225	87	7,40
		jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan/ plakat	2.000 PNS					400	400	
		jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan purna tugas	1.500 PNS					300	0	0
		jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya	75 PNS					15	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		jumlah PTT yang diterbitkan SPT nya	105 PTT					109	107	101,91
		jumlah PNS berprestasi	30 PNS					6	0	0
		jumlah fasilitasi JKK dan JKM	50 Keg.					10	10	20,00
		jumlah rapat tim penyusun Perbup TPP/ Tukin	15 Keg.					3	3	20,00
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah									
		persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian	100,00 Persen					100,00	75,00	75,00
		persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100,00 Persen					100,00	80,00	80,00
	Penyediaan Jasa Kantor									
		jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan					12	12	100,00
		penyediaan bahan bacaan	2.620 Eks					2.620	2.620	100,00
		jumlah ATK yang dibeli	50 Buah					510	510	1.020,00
		jumlah barang cetakan	13 Buah					13	13	100,00
		jumlah bahan pembersih	20 Jenis					20	20	100,00
		jumlah penerangan bangunan kantor	9 Buah					9	9	100,00
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit					1	1	100,00
		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	17 unit					17	17	100,00
		jumlah peralatan kantor yang dipelihara	34 unit					34	34	100,00
		jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	16 unit					16	16	100,00
		jumlah mebeleur yang dipelihara	125 unit					25	25	20,00
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor									
		jumlah kendaraan baru	11 unit					1	1	9,09
		jumlah perlengkapan kantor baru	12 unit					-	-	0
		jumlah perangkat komputer dan lainnya yang dibeli	19 unit					-	-	0
		Jumlah mebeleur baru	21 buah					-	-	0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
		jumlah ASN BKD yang mengikuti Pelatihan/bimtek	223 ASN					-	-	0
		jumlah majalah kepegawaian yang diterbitkan	1.250 eks					-	-	0
	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja									
		jumlah dokumen renja	50 Dok					5	5	20,00
		jumlah dokumen RKA/DPA	50 Dok					10	10	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program & Kegiatan (Renja PD tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
f	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		jumlah dokumen renstra/reviu	15 Dok					5	5	33,33
		Jumlah Dokumen LKJIP	15 Dok					3	3	20,00
		jumlah dokumen pelaporan kinerja	60 Dok					12	12	20,00
		Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah								
		jumlah pelaporan keuangan yang dibuat	15 Jenis					3	3	20,00
		jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan	60 Bulan					12	12	20,00
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi								
		jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan	11 Bulan					11	11	100,00
		jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 Bulan					11	11	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Pencapaian kinerja pelayanan BKD Kabupaten Tegal pada dokumen ini didasarkan pada indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. BKD Kabupaten Tegal pada tahun 2019 tidak melaksanakan tugas pembantuan sehingga hanya melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang merupakan bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKD tahun 2019 berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal adalah 78,98, kategori BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja BKD mendapatkan nilai capaian sebesar 66,35 dari maksimal nilai 80,00.

Adapun analisis terhadap pencapaian indikator sasaran BKD Kabupaten Tegal berdasarkan tataran pelaksana kebijakan yang mencakup 8 (delapan) aspek administrasi umum dalam LPPD dapat dijelaskan melalui Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel 2.2 (Tabel T-C.30) sebagai berikut.

Tabel 2.2 (T-C.30.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2018 (n-2)	tahun 2019 (n-1)	tahun 2020 (n)	tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	LPPD	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis)	program	11	11	5	3	11	11	0	0	
1.2		LPPD	Keberadaan standar operating procedure (SOP)	SOP	70	60	60	60	70	60	0	0	
2.3	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	LPPD	Keberadaan peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	Perda/Perbup	8	10	10	10	8	10	10	10	
3.4	Penataan kelembagaan daerah	LPPD	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Persen	94,74	95,00	95,00	95,50	94,74	94,74	95,00	95,50	
3.5		LPPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	orang	5	5	9	9	5	5	9	9	
4.6	Pengelolaan kepegawaian daerah	LPPD	Rasio PNS perangkat daerah terhadap total PNS Kabupaten	Rasio	1:183	1:167	1:160	1:155	1:183	1:167	1:165	1:165	
4.7		LPPD	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Persen	83,33	85,71	52,94	64,71	83,33	58,82	52,94	58,82	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2018 (n-2)	tahun 2019 (n-1)	tahun 2020 (n)	tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.8		LPPD	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.9	Perencanaan pembangunan daerah	LPPD	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PD (Renstra, Renja, RKA)	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	
5.10		LPPD	Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.11		LPPD	Program Renja perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah	persen	90,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
5.12		LPPD	Program RKA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.13		LPPD	Anggaran perangkat daerah terhadap total belanja APBD	persen	0,40	0,46	0,54	0,50	0,40	0,47	0,54	0,50	
6.14		LPPD	Realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	persen	0,40	0,47	0,54	0,50	0,37	0,45	0,54	0,50	
6.15		LPPD	Total belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	persen	74,36	73,04	77,27	75,45	68,10	71,85	77,27	75,45	
6.16		LPPD	Total belanja tidak langsung dari total belanja perangkat daerah	persen	28,03	23,74	22,73	24,55	31,90	28,15	22,73	24,55	
6.17		LPPD	Keberadaan laporan keuangan perangkat daerah (neraca, LRA, CaLK)	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2018 (n-2)	tahun 2019 (n-1)	tahun 2020 (n)	tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.18	Pengelolaan barang milik daerah	LPPD	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
7.19		LPPD	Persentase barang/aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.20	Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat	LPPD	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	jenis	8	8	8	8	8	8	8	8	
8.21		LPPD	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Tegal dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu unsur utama dalam tingkat Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu dibutuhkan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai sehingga seluruh pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi yang menunjang tugas pokok dan fungsinya.
2. Dampak pandemi covid-19 turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik selain masih rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik.
3. Penundaan pelaksanaan pengadaan CASN formasi tahun 2020 sebagai salah satu dampak dari pandemi covid-19 dan pelaksanaannya akan dilakukan bersama dengan formasi tahun 2021 diperkirakan masih dalam situasi normal baru diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaan seleksi;
4. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka pengadaan CPNS formasi 2019 yang diperkirakan akan mendapatkan NIP pada tahun 2020 ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan dasar pada tahun 2021;
5. Akuntabilitas aparatur pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka *good governance*;

Adapun solusi atau langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Untuk mengetahui profesionalisme ASN maka perlu dilakukan Peningkatan kompetensi PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan sehingga profesionalitas ASN dapat terlihat dari peningkatan indeks profesionalitas ASN;
2. Mendorong peningkatan kualitas dan implementasi roadmap sistem merit dalam manajemen ASN;
3. Kualitas pelayanan publik yang rendah akan di tingkatkan dengan pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan;

4. Meningkatnya perencanaan dan evaluasi kinerja secara periodik menjadi solusi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka good governance.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Beberapa catatan penting hasil review terhadap rancangan awal RKPD (Renja) BKD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- a. Pagu awal BKD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 11.062.275.000,- (sebelas milyar enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal pada tanggal 28 Februari 2020 menghasilkan keputusan penetapan kebutuhan pagu anggaran tahun 2021 sejumlah Rp. 20.977.250.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal mengalokasikan pagu anggaran untuk BKD sejumlah 20.977.250.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 tanggal 31 Maret 2020;
- d. Pagu indikatif BKD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021 sebagaimana dalam Peraturan Bupati Tegal nomor 42 tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebesar Rp 9.398.500.000,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Secara umum indikator kinerja program, kegiatan dan pagu anggaran dalam rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan indikator program, kegiatan dan pagu anggaran hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahapan forum perangkat daerah. Namun, pagu anggaran menjadi berkurang pada RKPD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.3 (Tabel T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2021

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jawa Tengah/DIY			10.802.275	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jawa Tengah/DIY			10.802.275	
			persentase PNS mengikuti Pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	5,62 %				persentase PNS mengikuti Pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	5,62 %		
			persentase Pejabat Fungsional Non pendidikan dan non pengawasan yang mengikuti Pelatihan fungsional (pembentukan/ jenjang) dan mendapatkan Sertifikat STTPL	4,34 %				persentase Pejabat Fungsional Non pendidikan dan non pengawasan yang mengikuti Pelatihan fungsional (pembentukan/ jenjang), dan mendapatkan Sertifikat STTPL	4,34 %		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar (latsar) /prajabatan sesuai peraturan	100,0 % 0				persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar (latsar) /prajabatan sesuai peraturan	100,00 %		
1	Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Tengah/ DIY/DKI				Pengembangan Kompetensi ASN melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Tengah/ DIY/DKI				
			jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	3 pim II 3 pim III 3 pim IV	10.122.275			jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	3 pim II 3 pim III 3 pim IV	10.122.275	biaya ditentukan oleh LAN
			jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/ prajabatan	949 CPNS				jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/ prajabatan	949 CPNS		UU. no,5/2015 tentang ASN, CPNS wajib menjalankan masa percobaan melalui diklat terintegrasi selama 1 tahun dan pemerintah wajib memberikan diklat tersebut

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah ASN non JF yang mengikuti pelatihan teknis	100 ASN				jumlah ASN non JF yang mengikuti pelatihan teknis	100 ASN		
			jumlah ASN JF non Pendidikan dan non Pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional	55 ASN				jumlah ASN JF non Pendidikan dan non Pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional	55 ASN		
2	Penilaian Kompetensi ASN	Kab Tegal			680.000	Penilaian Kompetensi ASN	Kab.Tegal			680.000	
			persentase JPT & Administrasi yg diuji kompetensinya	13,68 %				persentase JPT & Administrasi yg diuji kompetensinya	13,68 ASN		
			jumlah PNS nonfungsional dinilai kompetensinya	300 ASN				jumlah PNS nonfungsional dinilai kompetensinya	300 ASN		
			jumlah ASN yg mengikuti SAP	300 ASN				jumlah ASN yg mengikuti SAP	300 ASN		
			jumlah peserta ujian kedinasan (ujian dinas dan UKPPI)	100 ASN				jumlah peserta ujian kedinasan (ujian dinas dan UKPPI)	100 ASN		
			jumlah pejabat fungsional yg dinilai kom petensinya	20 ASN				jumlah pejabat fungsional yg dinilai kom petensinya	200 PNS		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program Pengembangan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	Kab. Tegal			920.000	Program Pengembangan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	Kab. Tegal			920.000	
			persentase jabatan struktural terisi sesuai dgn kompe tensinya	95,50 %				persentase jabatan struktural terisi sesuai dgn kompe tensinya	95,50 %		
			persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi	2,77 %				persentase jabatan fungsional non guru/ non kesehatan terisi	2,77 %		
			persentase JPT & Adm inistrasi yg diuji kompe tensinya	13,68 %				persentase JPT & Adm inistrasi yg diuji kompe tensinya	13,68 %		
1	Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Jawa Tengah			750.000	Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Jawa Tengah			750.000	
			jumlah JPT dan Adminis - trator yang dilantik	100 PNS				jumlah JPT dan Adminis - trator yang dilantik	100 PNS		Perbup. no.75/2017 Talent Scouting, digunakan sebagai pertimbangan promosi dan

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											mutasi jabatan Administrator dan Pengawas
			jumlah kepala sekolah yang dilantik	50 PNS				jumlah kepala sekolah yang dilantik	50 PNS		
			jumlah pejabat struktural dinilai kompetensinya melalui PCAP	20 PNS				jumlah pejabat struktural dinilai kompetensinya melalui PCAP	20 PNS		
			jumlah PNS mutasi antar instansi daerah, dan instansi daerah	45 PNS				jumlah PNS mutasi antar instansi daerah, dan instansi daerah	45 PNS		
			jumlah formasi JPT yang terisi	3 Formasi				jumlah formasi JPT yang terisi	3 Formasi		
2	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Jawa Tengah/ DIY/DKI			170.000	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Jawa Tengah/ DIY/DKI			170.000	
			jumlah PNS difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi	30 PNS				jumlah PNS difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi	30 PNS		
			jumlah pejabat fungsional yang mendapatkan SK JFT	200 PNS				jumlah pejabat fungsional yang mendapatkan SK JFT	200 PNS		
			jumlah pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan	200 PNS				jumlah pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan	200 PNS		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah pejabat fungsional baru non guru dan non kesehatan	30 PNS				jumlah pejabat fungsional baru non guru dan non kesehatan	30 PNS		
III	Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN	Jawa Tengah/ DIY/DKI	persentase layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	16,67 %	7.090.000	Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN	Jawa Tengah/ DIY/DKI	persentase layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	16,67 %	7.090.000	
1	Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi ASN	Jawa Tengah/ DIY/DKI			875.000	Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi ASN	Jawa Tengah/ DIY/DKI			875.000	
			jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara	9.700 file				jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara	9.700 file		
			jumlah KIP yang dicetak	1.500 kartu				jumlah KIP yang dicetak	1.500 kartu		
			jumlah OPD/ UPTD dengan presensi elektronik	910 unit				jumlah OPD/ UPTD dengan presensi elektronik	910 unit		
			jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG	9.700 orang				jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG	9.700 orang		
			jumlah SIM (software) dan perangkat yang dipelihara	917 unit				jumlah SIM (software) dan perangkat yang dipelihara	917 unit		
			jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/ anak)	581 S.K				jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/ anak)	581 S.K		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengadaan dan Kepangkatan ASN	Kab. Tegal			6.215.000	Pengadaan dan Kepangkatan ASN	Kab. Tegal			6.215.000	
			jumlah SK Kenaikan Pangkat	1.750 dok.				jumlah SK Kenaikan Pangkat	1.750 dok.		
			jumlah CASN	600 orang				jumlah CASN	600 orang		
			jumlah SK CASN	600 SK				jumlah SK CASN	600 SK		
			jumlah SPTKGB	750 SK				jumlah SPTKGB	750 SK		
			jumlah buku formasi	10 buku				jumlah buku formasi	10 buku		
			jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	399 orang				jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	399 orang		
IV	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Jawa Tengah/DIY/DKI	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan	0,52 %	585.000	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Jawa Tengah/DIY/DKI	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,52 %	585.000	
1	Pembinaan dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara	Jawa Tengah/DIY/DKI			215.000	Pembinaan dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara	Jawa Tengah/DIY/DKI			215.000	
			jumlah usulan Karpeg, Karis/Karsu yang terealisasi	300 kartu				jumlah usulan Karpeg, Karis/Karsu yang terealisasi	300 kartu		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah PNS mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	150 PNS				jumlah PNS meikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	150 PNS		
			jumlah ASN mendapatkan Hudis	60 ASN				jumlah ASN yang mendapatkan Hudis	60 ASN		
			jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS	49 unit				jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS	49 unit		
			jumlah ijin perceraian yang diterbitkan	40 ijin				jumlah ijin perceraian yang diterbitkan	40 ijin		
			jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	80 PNS				jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	80 PNS		
2	Kesejahteraan dan Fasilitas Korps Profesi ASN	Jawa Tengah/ DIY/DKI			370.000	Kesejahteraan dan Fasilitas Korps Profesi ASN	Jawa Tengah/ DIY/DKI			370.000	
			jumlah JPT dan Administ rasi diperiksa kesehatanya	22 PNS				jumlah JPT dan Administ rasi diperiksa kesehatanya	22 PNS		
			jumlah ASN mendapatkan SLKS	225 ASN				jumlah ASN mendapatkan SLKS	225 ASN		
			jumlah ASN mendapatkan plakat/ penghargaan	400 ASN				jumlah ASN mendapatkan plakat/ penghargaan	400 ASN		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah PNS yang menda patkan pembekalan purna tugas	400 PNS				jumlah PNS yang menda patkan pembekalan purna tugas	400 PNS		
			jumlah PNS sakit menahun yg diperiksa ke sehatannya	15 PNS				jumlah PNS sakit menahun yg diperiksa ke sehatannya	15 PNS		
			jumlah PTT yang diterbitkan SPT nya	109 PTT				jumlah PTT yang diterbitkan SPT nya	109 PTT		
			jumlah PNS berprestasi	6 PNS				jumlah PNS berprestasi	6 PNS		
			jumlah fasilitasi JKK dan JKM	10 Keg.				jumlah fasilitasi JKK dan JKM	10 Keg.		
			jumlah rapat tim penyusunan Perbup tentang TPP/Tukin	3 keg.				jumlah rapat tim penyusunan Perbup tentang TPP/Tukin	3 keg.		
V	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah	BKD Kab. Tegal	persentase layanan kesekretariatan	100 %	1.580.000	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah	BKD Kab. Tegal	persentase layanan kesekretariatan	100 %	1.580.000	

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Kantor	BKD Kab.Tegal			370.500	Penyediaan Jasa Kantor	BKD Kab.Tegal			370.500	
			Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan				Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan		
			penyediaan bahan bacaan	2.620 bulan				penyediaan bahan bacaan	2.620 bulan		
			jumlah ATK yang dibeli	50 buah				jumlah ATK yang dibeli	50 buah		
			jumlah barang cetakan	10 buah				jumlah barang cetakan	10 buah		
			jumlah bahan pembersih	10 jenis				jumlah bahan pembersih	10 jenis		
			jumlah penerangan bangunan kantor	10 jenis				jumlah penerangan bangunan kantor	10 jenis		
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	BKD Kab.Tegal			337.500	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	BKD Kab.Tegal			337.500	
			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit				jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit		
			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	17 unit				jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	17 unit		
			- mobil	6 unit				- mobil	6 unit		
			- sepeda motor	11 unit				- sepeda motor	11 unit		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jumlah peralatan kantor dipelihara	33 unit				jumlah peralatan kantor dipelihara	33 unit		
			- Komputer PC/ Desktop	15 unit				- Komputer PC/ Desktop	15 unit		
			- Laptop	5 unit				- Laptop	5 unit		
			- LCD Projector	3 unit				- LCD Projector	3 unit		
			- Printer	10 unit				- Printer	10 unit		
			- kamera	- unit				- kamera	- unit		
			jumlah perlengkapan kantor dipelihara	17 unit				jumlah perlengkapan kantor dipelihara	17 unit		
			- AC	15 unit				- AC	15 unit		
			- Sound system	1 unit				- Sound system	1 unit		
			- SIM/ jaring an telepon/ internet (hardware)	1				- SIM/ jaring an telepon/ internet (hardware)	1 0		
			jumlah mebeleir dipelihara	25 unit				jumlah mebeleir dipelihara	25 unit		
3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	BKD Kab.Tegal			322.000	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	BKD Kab.Tegal			322.000	
			jumlah kendaraan baru (mobil dan sepeda motor)	1 unit				jumlah kendaraan baru (mobil dan sepeda motor)	1 unit		
			jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	- unit				jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	- unit		
			- pompa air	- unit				- pompa air	- unit		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- mesin penghancur kertas	- unit				- mesin penghancur kertas	- unit		
			- Air Conditioner	- unit				- Air Conditioner	- unit		
			- monitor untuk pemaparan	- unit				- monitor untuk pemaparan	- unit		
			jumlah perangkat komputer dan perangkat lainnya yang dibeli	21 unit				jumlah perangkat komputer dan perangkat lainnya yang dibeli	21 unit		
			- Kompute PC/ Desktop	1 unit				- Kompute PC/ Desktop	1 unit		
			- Notebook/ laptop	5 unit				- Notebook/ laptop	5 unit		
			- printer	- unit				- printer	- unit		
			- LCD Projector	3 unit				- LCD Projector	3 unit		
			- Mesin Presensi/Adaptor	12 unit				- Mesin Presensi/Adaptor	12 unit		
			jumlah mebeleur baru	- unit				jumlah mebeleur baru	- unit		
			- meja kerja	- unit				- meja kerja	- unit		
			- kursi kerja	- unit				- kursi kerja	- unit		
			- meja resepsionis	- unit				- meja resepsionis	- unit		
			- kursi resepsionis	- unit				- kursi resepsionis	- unit		
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BKD Kab.Tegal			205.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BKD Kab.Tegal			205.000	
			jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan	11 ASN				jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat mndapatkan jamuan	11 ASN		
			jumlah bulan rakor dan konsultasi yang dipenuhi	12 bln				jumlah bulan rakor dan konsultasi yang dipenuhi	12 bln		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD Kab.Tegal			150.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD Kab.Tegal			150.000	
			jumlah ASN BKD yang mengikuti Pelatihan seminar/bimtek	55 PNS				jumlah ASN BKD yang mengikuti Pelatihan/ seminar/bimtek	55 PNS		
			jumlah majalah kepegawaian yang diterbitkan	250 eks.				jumlah majalah kepegawaian yang diterbitkan	250 eks.		
6	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	BKD Kab.Tegal			125.000	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	BKD Kab.Tegal			125.000	
			jumlah dokumen renja	10 Dok				jumlah dokumen renja	10 Dok		
			jumlah dokumen RKA/DPA	- Dok				jumlah dokumen RKA/DPA	- Dok		
			jumlah dokumen renstra/review renstra	10 Dok				jumlah dokumen renstra/review renstra	10 Dok		
			jumlah dokumen RTP SPIP	3 Dok				jumlah dokumen RTP SPIP	3 Dok		
			jumlah dokumen pelaporan kinerja	12 Dok				jumlah dokumen pelaporan kinerja	12 Dok		
			Jumlah Dokumen LKJIP	3 Dok				Jumlah Dokumen LKJIP	3 Dok		

no	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (dalam ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan dana (dalam ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	BKD Kab.Tegal			70.000	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	BKD Kab.Tegal			70.000	
			jumlah pelaporan keuangan	3 Jenis				jumlah pelaporan keuangan	3 Jenis		
			jumlah bulan honor penge lola keuang an yang dibayarkan	12 bulan				jumlah bulan honor penge lola keuang an yang dibayarkan	12 bulan		
			jumlah dokumen RKA/DPA	10 dok				jumlah dokumen RKA/DPA	10 dok		
JUMLAH ANGGARAN					20.977.275	JUMLAH ANGGARAN					20.977.275

Hasil analisis kebutuhan rencana kerja BKD Kabupaten Tegal merupakan hasil dari kegiatan forum perangkat daerah tahun 2020 sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan BKD tahun 2021 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renstra tahun 2019-2024 pada tahun kedua renstra ini diharapkan akan tercapai target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pagu anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana hasil forum perangkat daerah adalah sejumlah Rp 20.977.275.000,- diakomodir seluruhnya dalam rancangan awal RKPD tahun 2021 yaitu sejumlah Rp 20.977.275.000,- sehingga apabila pagu ini dapat direalisasikan dalam penetapan APBD Kabupaten Tegal tahun 2021, maka beban BKD dalam mencapai target renstra tahun 2019-2024 tidaklah berat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan (bila sudah dilakukan).

BKD Kabupaten Tegal sebagai OPD yang mempunyai kewenangan dibidang Kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan, tidak melayani masyarakat umum secara langsung, sehingga program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tidak ada. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD adalah merupakan kegiatan-kegiatan dibidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan mendukung kebijakan visi dan misi kepala daerah.

Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BKD KABUPATEN TEGAL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur negara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan public, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Agenda ketujuh RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, salah satunya adalah melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. Adanya pergeseran paradigma dalam mengelola kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, administrasi pembangunan, agenda pembangunan dan pelayanan publik yang inovatif menuntut hadirnya aparatur sipil negara yang professional, berintegritas, netral, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta didukung birokrasi yang lebih sederhana dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan.

Setiap organisasi birokrasi dituntut memiliki akuntabilitas kinerja yang baik secara internal maupun kepada publik. Kondisi akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah saat ini masih sebatas pada pemenuhan pelaporan sehingga masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Akuntabilitas belum merepresentasikan kinerja riil institusi birokrasi pemerintah dengan baik dan efektif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif, handal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang maan sebagai suatu bagian prasyarat untuk menuju *dynamic government*.

Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi dibidang kepegawaian untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penataan sistem manajemen SDM aparatur. Sebagai instansi yang bertugas mengelola SDM aparatur di Kabupaten Tegal, BKD Kabupaten Tegal berupaya melaksanakan program tersebut dengan memberikan prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung suksesnya pelaksanaan program nasional tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

A. TUJUAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dituju melalui rencana kerja sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

Tujuan ke-1 :

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
2. Diterapkannya Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Tujuan ke-2 :

2. Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah untuk mewujudkan ASN Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkualitas dengan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melakukan tugas-tugas yang diembannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta target kinerja BKD yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Tahun 2019-2024. Selain itu juga dalam rangka merealisasikan indikator kinerja BKD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu terkait dengan pencapaian misi pertama **"mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat"**.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BKD menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 yaitu :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan ASN;
2. Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN;
3. Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN;
4. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN;
5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator program tersebut dilakukan dengan melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan. Adapun sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dikelola yaitu dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, maka lokasi kegiatan sebagian besar berada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, BKN kantor Regional Yogyakarta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal tahun 2021, terdapat kesesuaian dengan Rumusan rencana program dan kegiatan pada rencana kerja BKD tahun 2021. Kesesuaian tersebut meliputi kesesuaian program, kegiatan dan indikator kinerja. Tabel 3.1. dibawah ini adalah Rumusan rencana program dan kegiatan BKD Kabupaten Tegal tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022.

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan PD	Terlaksananya proram peningkatan promosi dan kerjasama investasi				1.228.500	-	-	-		1.380.000
		persentase Pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah			100 persen					100 persen	
		persentase Pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah			100 persen					100 persen	
	1 1 Penyediaan Jasa Kantor		BKD Kab. Tegal	Masyarakat		370.500	-	-	-		385.000
		Jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air			12 bulan					12 bulan	
		Penyediaan bahan bacaan			2.880 eks.					2.620 eks	
		Jumlah ATK yang dibeli			63 jenis					26 jenis	
		Jumlah barang cetakan			13 jenis					13 jenis	
		Jumlah bahan pembersih			20 jenis					20 jenis	
		Jumlah penerangan bangunan kantor			9 jenis					9 jenis	
		Jumlah pameran yang diikuti			2 Keg.					2 Keg.	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	BKD Kab. Tegal	Masyarakat		300.000	-	-	-		325.000
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 unit					1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			17 unit					17 unit	
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			34 unit					34 unit	
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			16 unit					16 unit	
		Jumlah mebeleur yang dipelihara			25 unit					25 unit	
	3 3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	BKD Kab. Tegal	Masyarakat		200.000	-	-	-		250.000
		Jumlah kendaraan baru			-						
		Jumlah perlengkapan kantor baru			-						
		- mesin penghancur kertas			2 buah					2 buah	
		- Air Conditioner			3 buah					5 buah	
		- rak besi			5 buah						
		- mesin presensi			15 buah					15 buah	
		Jumlah perangkat computer dan lainnya yang dibeli			-						
		- Kompute PC/ Desktop			1 buah						

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)	
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- Notebook/ laptop			5 buah					5 buah		
		- printer			5 buah					5 buah		
		- LCD Projector			2 buah					1 buah		
		Jumlah meubelleir baru										
		- meja kerja			5 buah					5 buah		
		- kursi kerja			5 buah					5 buah		
	4 4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD Kab. Tegal	ASN BKD		35.000	-	-	-		80.000	
		Jumlah ASN BKD mengikuti pelatihan/ seminar/ bimtek			55 ASN					55 ASN		
		Jumlah penerbitan majalah kepegawaian			- -					250 eks.		
	5 5	Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja	BKD Kab. Tegal	Masyarakat		78.000	-	-	-	- -	85.000	
		Jumlah dokumen renja			5 buku					10 buku		
		Jumlah dokumen RTP SPIP			5 buku					5 buku		
		Jumlah dokumen renstra			5 buku					- buku		
		Jumlah dokumen Pelaporan kinerja			8 buku					8 buku		
		Jumlah dokumen Renja RB			5 buku					5 buku		
		Jumlah dokumen RKA/DPA			10 buku					10 buku		

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6 6	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	BKD Kab. Tegal			65.000	-	-	-	-	75.000
		Jumlah pelaporan keuangan yang dibuat			3 jenis					3 jenis	
		Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan			11 bulan					12 bulan	
	7 7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jateng, DiY, DKI	ASN BKD		180.000	-	-	-	-	180.000
		Jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan			11 bulan					11 bulan	
		Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang dipenuhi			12 bulan					12 bulan	
	II.	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN				3.815.000	-	-	-		5.100.000
		persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL			3,62 persen					3,62 persen	
		Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL			4,34 persen					4,34 persen	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan			50,00 persen					100 persen	
	8 1 Pendidikan dan Pelatihan ASN		BKD Kab. Tegal	PNS Pemkab. Tegal		3.315.000					4.500.000
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan			5 PNS					20 PNS	
		Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan			250 CPNS					250 CPNS	
		Jumlah ASN JF non pendidikan & non pengawasan mengikuti pelatihan fungsional			13 ASN					55 ASN	
		Jumlah ASN non JF yang mengikuti diklat teknis			25 skor					100 skor	
	9 2 Penilaian Kompetensi ASN		BKD Kab. Tegal	PNS Pemkab. Tegal		500.000					600.000
		persentase JPT & Administrasi yg diuji kompetensinya			13,68 persen					13,68 persen	
		Jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya			200 PNS					300 PNS	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah ASN yang mengikuti SAP			100 PNS					300 PNS	
		Jumlah pejabat fungsional yang dinilai kompetensinya			20 PNS					25 PNS	
		Jumlah peserta Ujian kedinasan (UD/UKPPI)			100 PNS					100 PNS	
	III. Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN					765.000	.	.	.		810.000
		persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi			95,50 persen					95,50 persen	
		persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi			2,77 persen					2,77 persen	
		persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya			13,68 persen					13,68 persen	
	10 1 Pengembangan Karir Jabatan PimpinanTinggi dan Jabatan Administrasi		BKD Kab. Tegal	ASN Kab.Tegal		615,000					650.000
		Jumlah JPT dan Administrator yang dilantik			100 PNS					100 PNS	
		Jumlah kepala sekolah yang dilantik			100 PNS					50 PNS	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP			24 PNS S					30 PNS S	
		Jumlah formasi JPT yang terisi			4 formasi					4 formasi	
		jumlah PNS mutasi antar instansi daerah, dan instansi daerah			30 PNS					45 PNS	
	11 2 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional		BKD Kab. Tegal	PNS JF Pemkab.Tegal		150.000					160.000
		Jumlah PNS difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi			25 PNS					30 PNS	
		jumlah pejabat fungsional yang mendapatkan SK JFT			200 PNS					200 PNS	
		Jumlah pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan			200 PNS					200 PNS	
		Jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan			30 PNS					30 PNS	
	IV. Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN	Persentase SIM Kepegawaian yang terintegrasi			2,77 Persen	3.040.000	.	.	.	2,77 persen	5.250.000
	12 1 Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi ASN		BKD Kab. Tegal	ASN Kab.Tegal		730.000					750.000

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara			9.700 file					9.700 file	
		jumlah OPD/ UPTD dengan presensi elektronik			1.500 kartu					1.500 kartu	
		Jumlah OPD/UPTD dengan presensi elektronik			910 unit kerja					910 unit kerja	
		Jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG			9.700 ASN					9.700 ASN	
		Jumlah SIM (software) dan perangkat yang dipelihara			917 buah					917 buah	
		Jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/ anak			581 SK					581 SK	
	13 2	Pengadaan dan Kepangkatan ASN	BKD Kab. Tegal			2.310.000					4.500.000
		Jumlah SK Kenaikan pangkat			1.750 SK					1.750 SK	
		Jumlah CASN			550 CAS N					550 CAS N	
		Jumlah SK CASN			550 SK					550 SK	
		Jumlah SPTKGB			750 SK					750 SK	
		Jumlah buku formasi			10 buku					10 buku	
		Jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS			350 PNS					350 PNS	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	V. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Persentase PNS mendapatkan hukuman disiplin	BKD Kab. Tegal		0,52 persen	550.000	-	-	-	11 keg	650.000
	14 1 Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN		BKD Kab. Tegal	Masyarakat		200.000					250.000
		Jumlah usulan Karpeg, karis/karsu yang terealisasi			300 kartu					300 kartu	
		Jumlah PNS mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			250 PNS					150 PNS	
		Jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin			47 ASN					45 ASN	
		Jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS			49 unit kerja					49 unit kerja	
		Jumlah ijin perceraian yang diterbitkan			40 ijin					50 ijin	
		Jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN			104 pejabat					80 pejabat	
	15 2 Kesejahteraan dan Fasilitas Kopr Profesi ASN		BKD Kab. Tegal	Masyarakat		350.000					400.000
		Jumlah JPT dan Administrator yang diperiksa kesehatannya			10 PNS					10 PNS	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (n)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022 (n+1)	
			Lokasi	Kelompok Sasaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (,000)
						APBD Kab (,000)	APBD Prov	APB N			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya			200 PNS					225 PNS	
		Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan/ plakat			512 ASN					400 ASN	
		Jumlah PNS purna tugas yang mendapatkan pembekalan			- PNS					300 PNS	
		Jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya			10 PNS					15 PNS	
		Jumlah PTT yang diterbitkan SPT kembali			103 PTT					109 PTT	
		Jumlah PNS berprestasi			- PNS					6 PNS	
		Jumlah fasilitasi JKK dan JKM			10 kegiatan					10 kegiatan	
		Jumlah rapat tim penyusun perbup TPP/ Tunjangan kinerja			3 kegiatan					3 kegiatan	
		JUMLAH ANGGARAN				9,398,500					13,190,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BKD tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Rencana kerja juga merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Adapun visi Kabupaten Tegal yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia". Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021 yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Renja ini tetap mempertimbangkan beberapa hal, *pertama*, program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Tegal sebagai pengelola kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. *Kedua*, adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. *Ketiga*, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. *Keempat*, adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Rencana kerja BKD tahun 2021 memuat informasi tentang sasaran yang akan dituju dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Indikator program dan kegiatan dan target yang hendak dicapai oleh BKD pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini.

Tabel 4.1.
Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Target	Satuan	Penanggungjawab
1	meningkatnya indeks profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	72,12	Skor	Kepala BKD
2	Diterapkannya sistem merit dalam manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	0,58	skor	Kepala BKD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	82,20	skor	Kepala BKD
		Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	72,00	skor	Kepala BKD

No	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Satuan	Penanggungjawab
1	Terlaksananya Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	Sekretaris
		persentase Pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	Persen	Sekretaris
2	Terlaksananya program Pendidikan dan pelatihan ASN	persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	3,62	Persen	Kepala Bidang Diklat ASN
		Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL	4,34	Persen	
		persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan	50,00	Persen	

No	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Satuan	Penanggungjawab
3	Terlaksananya program Pengembangan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	95,50	Persen	Kepala Bidang Pengembangan Karir ASN
		persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	2,77	Persen	
		persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	13,68	Persen	
4	Terlaksananya program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN	persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	16,67	Persen	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi ASN
5	Terlaksananya program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	0,52	Persen	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Penanggungjawab
1	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan pelatihan ASN	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan	9	PNS	Kepala Sub Bidang Diklat ASN
		Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan	250	CPNS	
		Jumlah ASN JF non pendidikan & non pengawasan mengikuti pelatihan fungsional	55	ASN	
		Jumlah ASN non JF yang mengikuti pelatihan teknis	100	skor	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Penanggungjawab
2	Terlaksananya kegiatan Penilaian kompetensi ASN	Jumlah PNS nonfungsional yang dinilai kompetensinya	300	PNS	Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi ASN
		Jumlah ASN yang mengikuti SAP	300	PNS	
		Jumlah peserta Ujian kedinasan (UD/UKPPI)	100	PNS	
		Jumlah pejabat fungsional yang dinilai kompetensinya	25	PNS	
3	Terlaksananya kegiatan Pengembangan karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Jumlah JPT dan Administrator yang dilantik	100	PNS	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
		Jumlah kepala sekolah yang dilantik	50	PNS	
		Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP	20	PNSS	
		Jumlah formasi JPT yang terisi	3	Formasi	
		Jumlah PNS mutasi antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah	45	PNS	
4	Terlaksananya kegiatan Pengembangan karir jabatan fungsional	Jumlah PNS yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi	30	PNS	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Fungsional
		jumlah pejabat fungsional yang mendapatkan SK JFT	200	PNS	
		Jumlah pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan	200	PNS	
		Jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan	30	PNS	
5	Terlaksananya kegiatan Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi ASN	Jumlah KIP yang dicetak	1.500	Buah	Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi ASN
		Jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara	9.700	File	
		Jumlah OPD/UPTD dengan presensi elektronik	910	Unit kerja	
		Jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG	9.700	ASN	
		Jumlah SIM (software) dan perangkat yang dipelihara	917	Buah	
		Jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/ anak	563	SK	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Penanggungjawab
6	Tertindakannya kegiatan Penataan administrasi formasi, pengadaan dan kepangkatan ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat	1.750	SK	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan ASN
		Jumlah CASN	550	CASN	
		Jumlah SK CASN	550	SK	
		Jumlah SPTKGB	750	SK	
		Jumlah buku formasi	10	Buku	
		Jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	350	PNS	
7	Tertindakannya kegiatan Pembinaan aparatur sipil negara	Jumlah usulan Karpeg, karis/karsu yang terealisasi	300	Kartu	Kepala Sub Bidang Pembinaan ASN
		Jumlah PNS mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	PNS	
		Jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	50	ASN	
		Jumlah OPD/UPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS	49	Unit kerja	
		Jumlah ijin perceraian yang diterbitkan	40	Ijin	
		Jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	80	Pejabat	
8	Tertindakannya kegiatan Pemberian penghargaan dan kesejahteraan ASN	Jumlah JPT dan Administrator yang diperiksa kesehatannya	20	PNS	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan ASN
		Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	225	PNS	
		Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan/plakat	400	ASN	
		Jumlah PNS purna tugas yang mendapatkan pembekalan	400	PNS	
		Jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya	15	PNS	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Penanggungjawab
		Jumlah PTT yang diterbitkan SPT kembali	109	PTT	
		Jumlah PNS berprestasi	6	PNS	
		Jumlah fasilitasi JKK dan JKM	10	Kegiatan	
		Jumlah rapat tim penyusun perbup TPP/ Tunjangan kinerja	3	Kegiatan	
9	Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa kantor	Jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12	Bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan bahan bacaan	2.620	Eksemplar	
		Jumlah ATK yang dibeli	26	Jenis	
		Jumlah barang cetakan	13	jenis	
		Jumlah bahan pembersih	20	Jenis	
		Jumlah penerangan bangunan kantor	9	jenis	
10	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan sarana prasarana kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	17	Unit	
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	34	Unit	
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	16	Unit	
		Jumlah mebeleur yang dipelihara	25	unit	
11	Terlaksananya kegiatan Pengadaan sarana prasarana kantor	Jumlah kendaraan baru	5	Unit	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah perlengkapan kantor baru	25	buah	
		Jumlah perangkat komputer dan lainnya	13	Unit	
		Jumlah mebeleur baru	10	buah	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Penanggungjawab
12	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN BKD yang mengikuti pelatihan/ seminar/ bimtek	55	ASN	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
		Jumlah penerbitan majalah kepegawaian	-	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan
13	Terlaksananya kegiatan perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen renja	10	Buku	Kepala Sub Bagian Perencanaan
		Jumlah dokumen RKA/DPA	10	Buku	
		Jumlah dokumen renstra	5	buku	
		Jumlah dokumen LKJIP	3	Buku	
		Jumlah pameran investasi yang diikuti	2	Kegiatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Terlaksananya kegiatan Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah pelaporan keuangan yang dibuat	3	Jenis	
		Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan	11	Bulan	
15	Terlaksananya kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah bulan pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan	11	bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang dipenuhi	12	bulan	

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Program BKD Kabupaten Tegal merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKD. Rencana program prioritas beserta indikator program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BKD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2021 adalah sebagaimana **tabel 4.2** berikut.

Tabel 4.2
Pendanaan Perangkat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan			APBD Kab. Tegal
1	2			3
	I.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah		
	1	1	Penyediaan Jasa Kantor	370.500.000
	2	2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	300.000.000
	3	3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	200.000.000
	4	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000
	5	5	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	78.000.000
	6	6	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	65.000.000
	7	7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	180.000.000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan			APBD Kab
II.	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN			
	8	1	Pendidikan dan Pelatihan ASN	3.315.000.000
	9	2	Penilaian Kompetensi ASN	500.000.000
III.	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN			
	10	1	Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	615.000.000
	11	2	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	150.000.000
IV.	Program Mutasi dan Pengelolaan Data ASN			
	12	1	Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi ASN	730.000.000
	13	2	Pengadaan dan Kepangkatan ASN	2.310.000.000
V.	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN			
	14	1	Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN	200.000.000
	15	2	Kesejahteraan dan Fasilitasi Korps Profesi ASN	350.000.000
				9.398.500.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan tahunan yang memuat berbagai kegiatan tahun anggaran 2021 dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Renstra BKD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Program dan kegiatan dirumuskan secara konkrit, disertai dengan rencana capaian program dan kegiatan yang memuat indikator *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur sehingga pencapaian tujuan dan sasaran akan dapat berjalan secara efektif.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Harapan kami Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas bagi segenap ASN pada BKD Kabupaten Tegal. Dengan mempedomani Renja, akan dapat diketahui secara pasti apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Slawi, Agustus 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,**



RETNO SUPROBOWATI, SH, MM, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19601101 198603 2 008

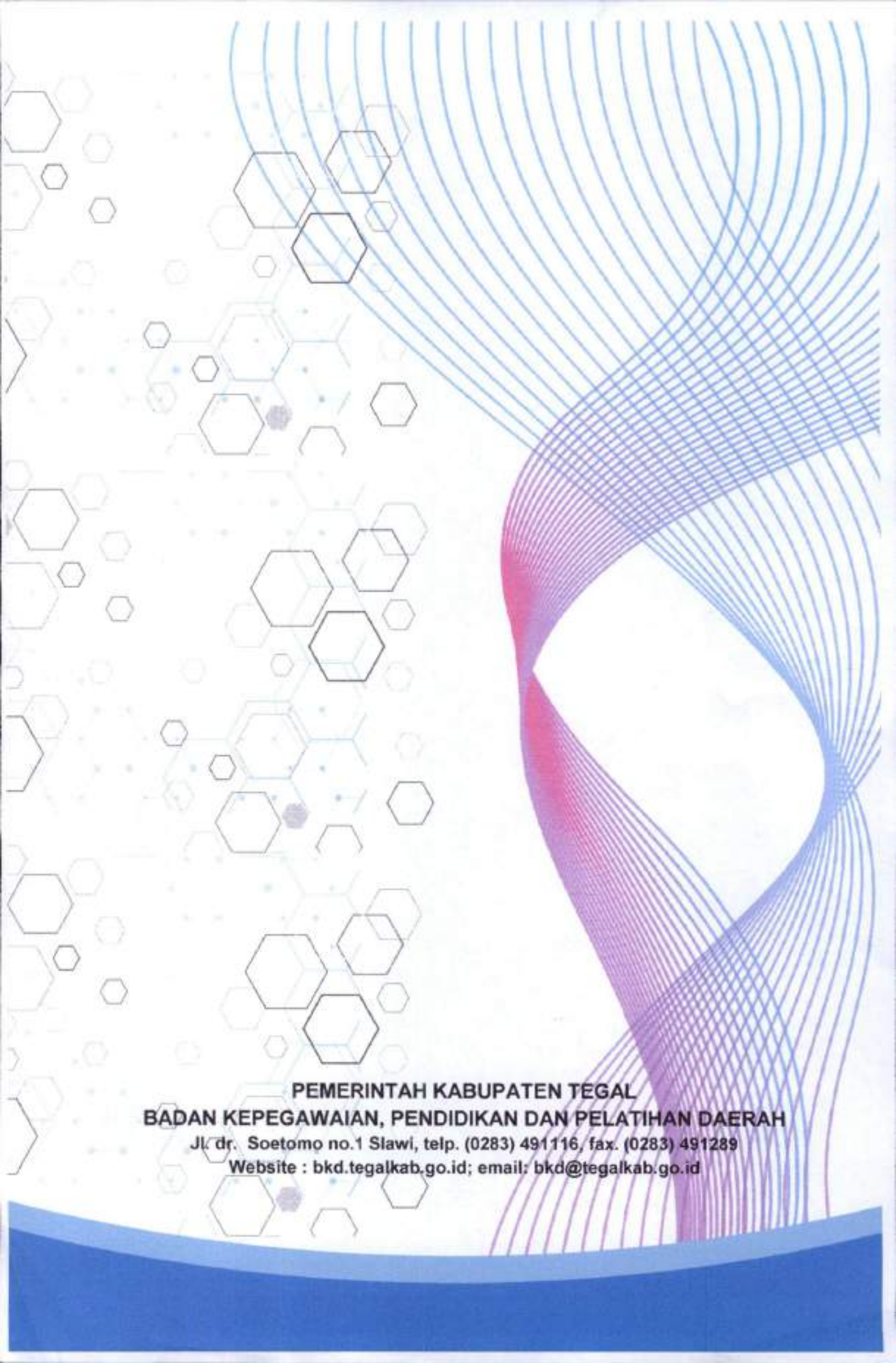
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
BERDASARKAN HASIL PEMETAAN SESUAI PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN SESUAI DENGAN RENSTRA/PERUBAHAN PD 2019-2024		PROGRAM/KEGIATAN HASIL PEMETAAN SESUAI PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai RENSTRA PD 2019-2024)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program Permendagri No.90 Tahun 2019 (Review RPJMD dan Renstra)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rancana)		
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
I Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL - Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawas yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan sertifikat/STTPL - Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar/prajabatan 	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL - Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawas yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan sertifikat/STTPL - Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar/prajabatan 	Jawa Tengah/ DIY	3,62 %	3,815,000,000
				Jawa Tengah/ DIY/DKI	4,34 %	
				Jawa Tengah	50,00 %	
1 Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan - jumlah CPNS mengikuti pelatihan dasar/prajabatan - jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan sertifikat/STTPL - Jumlah ASN non JF yang mengikuti pelatihan teknis 	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan - jumlah CPNS mengikuti pelatihan dasar/prajabatan - jumlah ASN JF non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan sertifikat/STTPL - Jumlah ASN non JF yang mengikuti pelatihan teknis 	Jawa Tengah/DIY/DKI	5 PNS	3,315,000,000
				Jawa Tengah	250 CPNS	
				Jawa Tengah/DIY	13 ASN	
				Jawa Tengah/DIY	25 ASN	
2 Kegiatan : Penilaian Kompetensi ASN (Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya - Jumlah ASN yang mengikuti SAP - jumlah peserta ujian kedinasan (UD, UKPP) - jumlah pejabat fungsional yang dinilai kompetensinya 	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah PNS non fungsional yang dinilai kompetensinya - jumlah ASN yang mengikuti SAP - jumlah peserta ujian kedinasan (UD, UKPP) - jumlah pejabat fungsional yang dinilai kompetensinya 	Jawa Tengah	200 PNS	500,000,000
				Slawi	100 PNS	
				Semarang	100 PNS	
				Jawa Tengah/ DIY/DKI	20 PNS	
II Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase JPT, jabatan administrator, dan jabatan pengawas terisi - Persentase jabatan fungsional non guru/kesehatan terisi - Persentase JPT dan jabatan administrasi yang diuji kompetensinya 	Program Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase JPT, jabatan administrator, dan jabatan pengawas terisi - Persentase jabatan fungsional non guru/keesehatan terisi - Persentase JPT dan jabatan administrasi yang diuji kompetensinya 	Kab. Tegal	95,5 %	765,000,000
				Kab. Tegal	2,77 %	
				Kab. Tegal	13,68 %	
3 Kegiatan : Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah JPT dan Administrator yang dilantik - Jumlah kepala sekolah yang dilantik - Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP - Jumlah formasi JPT yang terisi 	Kegiatan Pengembangan Karir ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah JPT dan Administrator yang dilantik - Jumlah kepala sekolah yang dilantik - Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya melalui PCAP - Jumlah formasi JPT yang terisi 	Jawa Tengah	100 orang	615,000,000
				Slawi	100 orang	
				Jawa Tengah	24 PNS	
				Slawi	4 Formasi	

PROGRAM/KEGIATAN SESUAI DENGAN RENSTRA/PERUBAHAN PD 2019-2024		PROGRAM/KEGIATAN HASIL PEMETAAN SESUAI PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai RENSTRA PD 2019-2024)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program Permendagri No.90 Tahun 2019 (Review RPJMD dan Resetra)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)		
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
	- Jumlah PNS mutasi kerja/alih fungsi		- Jumlah PNS mutasi kerja/alih fungsi	Jawa Tengah/ DIY/DKI	30 PNS	
4 Kegiatan : Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	- Jumlah PNS yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi - Jumlah pejabat fungsional yang mendapatkan SK JFT - Jumlah pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan - Jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan	Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN	- Jumlah PNS yang difasilitasi DUPAK JFT instansi pembina pusat dan provinsi - Jumlah pejabat fungsional yang mendapatkan SK JFT - Jumlah pejabat fungsional yang dilantik/ dikukuhkan - Jumlah pejabat fungsional baru non guru non kesehatan	Jawa Tengah/ DIY/DKI Sawi	25 PNS 200 PNS 200 PNS 30 PNS	150,000,000
III Program Mutasi dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara	- Persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	Program Kepegawaian Daerah	- Persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	Jawa Tengah/ DIY/DKI	16.67 %	3,640,000,000
5 Kegiatan : Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi ASN	- jumlah ansp kepegawaian yang dipelihara - jumlah KIP yang dicetak - jumlah OPDUPTD dengan presensi elektronik - jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG - Jumlah SIM (software) dan perangkat yang dipelihara - Jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/lanak)	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	- jumlah ansp kepegawaian yang dipelihara - jumlah KIP yang dicetak - jumlah OPDUPTD dengan presensi elektronik - jumlah pegawai yang dikelola melalui SIMPEG - Jumlah SIM (software) dan perangkat yang dipelihara - Jumlah SK Pensiun (BUP, APS, janda/duda/lanak)	Jawa Tengah/ DIY/DKI Sawi Kab. Tegal Kab. Tegal Jawa Tengah/ DIY/DKI Jawa Tengah/ DIY/DKI	9700 file 1500 buah 910 unit 9700 orang 917 unit 581 SK	730,000,000
6 Kegiatan : Pengadsan dan Kepegabatan ASN	- jumlah SK Karakan Pangkat - jumlah CASH - Jumlah SK CASH - Jumlah SPTKGB - Jumlah buku formasi - jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	- jumlah SK Karakan Pangkat - jumlah CASH - Jumlah SK CASH - Jumlah SPTKGB - Jumlah buku formasi - jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	Jawa Tengah/ DIY/DKI Jawa Tengah/DIY Jawa Tengah/DIY Sawi Sawi Sawi	1750 SK 550 orang 550 SK 750 SK 10 dok. 350 CPNS	2,310,000,000
IV Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	- Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Program Kepegawaian Daerah	- Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Jawa Tengah/ DIY/DKI	0.52 %	550,000,000
7 Kegiatan : Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN	- jumlah usulan karpeg, karis/karsu yang terealisasi - jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan - jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - jumlah OPDUPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS - Jumlah ijin perceraian yang diterbitkan - jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	Kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	- jumlah usulan karpeg, karis/karsu yang terealisasi - jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan - jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin - jumlah OPDUPTD yang dilakukan sidak disiplin PNS - Jumlah ijin perceraian yang diterbitkan - jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN	Jawa Tengah/ DIY/DKI Sawi Sawi Kab. Tegal Kab. Tegal Kab. Tegal	300 kartu 250 PNS 47 ASN 49 unit 40 ijin 104 PNS	550,000,000

PROGRAM/KEGIATAN SESUAI DENGAN RENSTRA/PERUBAHAN PD 2019-2024		PROGRAM/KEGIATAN HASIL PEMETAAN SESUAI PERMENDAGRI NO.96 TAHUN 2019					
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai RENSTRA PD 2019-2024)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program Permendagri No.96 Tahun 2019 (Review RPJMD dan Resntra)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8 Kegiatan : Kesehatan dan Fasilitas Korpe Profesi ASN	- jumlah JPT/Administrator yang diperiksa kesehatannya		- jumlah JPT/Administrator yang diperiksa kesehatannya	Kab. Tegal	10 PNS		
	- jumlah ASN yang mendapatkan SLKS		- jumlah ASN yang mendapatkan SLKS	Jawa Tengah	200 ASN		
	- jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan/plakat		- jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan/plakat	Sawi	512 ASN		
	- jumlah PNS yang mendapatkan pembekelan purna		- jumlah PNS yang mendapatkan pembekelan purna	Sawi	0 PNS		
	- jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa		- jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa	Sawi	10 PNS		
	- jumlah PTT yang diterbitkan SPT nya		- jumlah PTT yang diterbitkan SPT nya	Sawi	103 PTT		
	- jumlah PNS berprestasi		- jumlah PNS berprestasi	Sawi	0 PNS		
	- jumlah fasilitas JKK dan JKM		- jumlah fasilitas JKK dan JKM	Jawa Tengah/ DIY/DKI	10 keg.		
	- jumlah rapat Tim Penyusun Perbup TPP/Tukin		- jumlah rapat Tim Penyusun Perbup TPP/Tukin	Sawi	3 keg.		
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah BKD Kabupaten Tegal	- persentase layanan kesekretariatan		- persentase layanan kesekretariatan	Sawi	100 %	1,228,500,000
9 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kantor		Kegiatan : Administrasi Umum				1,050,500,000	
	- jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air		- jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	BKD Kab.Tegal	12 bin		
	- penyediaan bahan bacaan		- penyediaan bahan bacaan	BKD Kab.Tegal	2880 eks		
	- jumlah ATK yang dibeli		- jumlah ATK yang dibeli	BKD Kab.Tegal	63 jenis		
	- jumlah peralatan komputer yang dibeli		- jumlah peralatan komputer yang dibeli	BKD Kab.Tegal	0 jenis		
	- jumlah barang cetakan		- jumlah barang cetakan	BKD Kab.Tegal	13 jenis		
	- jumlah bahan pembersih		- jumlah bahan pembersih	BKD Kab.Tegal	20 jenis		
	- jumlah penenangan bangunan kantor		- jumlah penenangan bangunan kantor	BKD Kab.Tegal	9 jenis		
	- jumlah pameran yang diikuti		- jumlah pameran yang diikuti	BKD Kab.Tegal	2 kali		
	10 Kegiatan : Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor		- jumlah gedung kantor yang dipelihara		- jumlah gedung kantor yang dipelihara		BKD Kab.Tegal
- jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			- jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BKD Kab.Tegal			
- mobil			- mobil		6 unit		
- sepeda motor			- sepeda motor		11 unit		
- jumlah peralatan kantor yang dipelihara			- jumlah peralatan kantor yang dipelihara	BKD Kab.Tegal			
- CPU			- CPU		15 unit		
- Laptop			- Laptop		6 unit		
- LCD Projector			- LCD Projector		3 unit		
- printer			- printer		10 unit		
- jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			- jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	BKD Kab.Tegal			
- AC			- AC		15 unit		
- soundsystem			- soundsystem		0 unit		
- jaringan telepon/internet		- jaringan telepon/internet		1 unit			
- jumlah mebelir yang dipelihara		- jumlah mebelir yang dipelihara	BKD Kab.Tegal	25 unit			
11 Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	- jumlah kendaraan baru		- jumlah kendaraan baru	BKD Kab.Tegal	0 unit		
	- jumlah perangkat komputer dan lainnya yang dibeli		- jumlah perangkat komputer dan lainnya yang dibeli	BKD Kab.Tegal			



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Jl. dr. Soetomo no.1 Slawi, telp. (0283) 491116, fax. (0283) 491289
Website : bkd.tegalkab.go.id; email: bkd@tegalkab.go.id